

250 Kelompok Kesenian Dapat Bantuan Rp 10,5 M

TEMANGGUNG (KR) - Pemerintah Kabupaten Temanggung menyalurkan dana Rp 10,5 miliar bantuan hibah untuk 250 kelompok kesenian tahun 2024. Pj Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo mengatakan masing-masing kelompok kesenian tidak mendapat bantuan hibah yang sama. Bantuan yang didapat kelompok masing-masing antara Rp 50 juta hingga Rp 150 juta.

"Bantuan untuk kelompok kesenian ini diberikan tiap tahun. Untuk tahun ini, total bantuan Rp 10,5 miliar," jelas Hary Agung pada penyerahan bantuan di Graha Bhumi Pahala, Selasa (30/4). Menurutnya, tujuan pemberian bantuan hibah untuk penguatan pelaku seni, melengkapi sarana dan prasarana, serta nguri-uri tradisi budaya di Temanggung.

Dikatakan, di era teknologi informasi ini ancaman terhadap seni budaya sangat luar biasa, dan dikhawatirkan akan menggerus budaya tradisi di Indonesia pada umumnya dan di Temanggung khususnya. Karena itu, perlu penguatan pada kelompok kesenian, di antaranya dengan memberikan bantuan hibah.

Bupati berharap bantuan segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan kelompok seni mampu mememntaskan karya seni budaya tingkat regional, nasional maupun internasional. "Kabupaten Temanggung memiliki banyak kelompok kesenian dan termasuk terbesar dari nusantara. Hampir setiap RT di Kabupaten Temanggung ada kelompok seni budaya," ungkapnya.

Temanggung sebagai salah satu pusat budaya Nusantara, memiliki kesenian asli yakni jaran kepang, yang akan dipentaskan di TMII dan Bundaran HI Jakarta pada *car free day*, 12 Mei 2024. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Hendra Sumaryana mengatakan, dalam event tersebut juga akan diperkenalkan produk UMKM andalan Kabupaten Temanggung, seperti kopi, tembaku dan kerajinan dari kayu. (Osy)-f



KR-Zaini Arrosyid

Penyerahan bantuan secara simbolis untuk 250 kelompok kesenian di Kabupaten Temanggung.

DIPERINGATI DI SUKOHARJO Hari Otonomi Daerah dan Hardiknas

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo peringati Hari Otonomi Daerah XXVIII dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2024 dengan menggelar upacara bendera di halaman Setda Sukoharjo, Kamis (2/5). Kegiatan dipimpin Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutannya mengatakan, tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah pemberian sebagian besar kewenangan, khususnya kewenangan konkuren yang diberikan kepada daerah.

"Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, sistem pemerintahan yang awalnya pada masa Orde Baru bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Namun bukan merupakan desentralisasi penuh melainkan desentralisasi sebagian. Saat ini di Indonesia ada 38 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota," ungkap bupati.

Terkait Hari Pendidikan Nasional, Etik Suryani mengungkapkan, selama lima tahun terakhir ini Gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kita tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. Ini bukan hal yang mudah, untuk mentransformasi sistem yang sangat besar. Juga bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. "Pada awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan," tandasnya. (Mam)-f

Peringatan Hardiknas di Boyolali

BOYOLALI (KR) - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati dengan upacara yang dilaksanakan di Alun-alun Kidul Kabupaten Boyolali. Bupati Boyolali M Said Hidayat menjadi inspektur pada upacara yang diikuti oleh siswa siswi dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang mengenakan pakaian adat nusantara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Boyolali, Supana mengatakan, peringatan Hardiknas tahun 2024 ini dirangkai dalam beberapa acara. Sebelum pelaksanaan upacara pada pagi hari ini, Rabu (1/5), malamnya digelar acara tirakatan di halaman kantor Disdikbud Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini melibatkan segenap pihak yang terkait dalam bidang pendidikan. Tirakatan digelar dalam bentuk diskusi dan saling introspeksi atas pelaksanaan program Pendidikan di Kabupaten Boyolali selama satu tahun.

Masih dalam rangka peringatan Hardiknas, ke depan Disdikbud Kabupaten Boyolali juga akan menggelar lomba drumband antarsekolah pada pertengahan Mei mendatang. Selain itu, ada pula Pekan Inovasi Pendidikan yang akan dilaksanakan akhir Mei. "Intinya, kita ingin bereksprosi, ingin menunjukkan jati diri komunitas Pendidikan di Kabupaten Boyolali," jelas Supana.

Bupati Said mengatakan, peringatan Hardiknas adalah hal yang penting dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang hebat dan tangguh. Ia juga menyampaikan, dengan tema Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar adalah bagaimana merdeka belajar, membangun kemandirian, dan peran aktif, kreatif dan kritis para pelajar. (Mul)-f

LAHAN SAWAH DILINDUNGI DI KARANGANYAR

Pemkab Sulit Cari Lokasi Pengganti

KARANGANYAR (KR) - Pemerintah Kabupaten Karanganyar kesulitan mencari lokasi pengganti lahan sawah yang dilindungi (LSD) lantaran sawah di wilayah perkotaan bakal habis terpakai kebutuhan sektor industri dan jasa. Sektor industri dan jasa awalnya bakal digeser ke Gondangrejo, namun terhalang penetapan kawasan cagar budaya.

Plt Sekda Pemkab Karanganyar, Zulfikar Hadid mengatakan LSD Karanganyar belum juga final dibahas di Kementerian ATR/BPN. Regulasi tata ruang dan wilayah (RTRW) di Kecamatan Karanganyar Kota, Jaten dan Tasikmadu diarahkan mengakomodasi kebutuhan industri, niaga dan jasa. Bahkan di dalamnya tidak lagi dipertahankan sebagai LSD.

"Dalam dokumen RTRW, Pemkab Karanganyar mengakomodir perkembangan hingga 5-10 tahun ke depan. Di wilayah Kecamatan Karanganyar Kota, bahkan LSD-nya dinolkan," ungkap Zulfikar di hadapan rombongan kunjungan kerja Pansus X DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karanganyar di ruang Podang 1

kompleks Setda, Jumat (3/5).

Menurutnya, pencarian lokasi pengganti LSD paling memungkinkan daripada menggeser kawasan industri, misalnya ke Gondangrejo, meskipun wilayah kecamatan ini cocok dibangun pabrik karena kurang cocok dipakai bercocok tanam.

Seiring perjalanan waktu, ungkap Zulfikar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tujuh desa di Gondangrejo

masuk kawasan cagar budaya situs manusia purba Sangiran. Aturan cagar budaya ini menyulitkan pemilik lahan mengubah struktur tanah untuk modernisasi. "Harapan kami, ada pembahasan khusus berapa LSD riil di Karanganyar. Perkembangan ke depan sangat membutuhkan ruang untuk industri dan jasa. RTRW Kabupaten Karanganyar sudah menyesuaikan. Tinggal sinkronisasi di kementerian

ATR/BPN," jelasnya.

Wakil Ketua Pansus X DPRD Jateng, Muhammad Yunus mengatakan problem LSD kabupaten di Jateng mirip. Pemerintah daerah perlu mengakomodir kebutuhan itu di regulasi tata ruang. Pemda sering terbentur aturan di tingkat pusat, seperti cetak lahan sawah baru dan kawasan cagar budaya. "Karanganyar ini punya dua waduk besar. Pemerintah pusat sangat berharap adanya peningkatan produktivitas pangan. Di Karanganyar, ternyata ada masalah kaji ulang LSD," tambah Yunus.

Yunus juga mengatakan perlunya penguatan ekonomi penduduk di Gondangrejo yang saat ini terbentur kawasan cagar budaya. "Harus ada solusi dari pansus RTRW. Masyarakatnya diberi stimulan usaha non agraris. Jangan hanya mengandalkan lahan eksisting," tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pansus X DPRD Jateng menakar keberhasilan program pemerintah provinsi di daerah. Kemudian mendorong tercapainya target tersebut. "Ini juga untuk mengukur kebutuhan anggaran provinsi dalam bentuk bantuan keuangan ke daerah," ungkapnya. (Lim)-f



KR-Abdul Alim

Wakil Ketua Pansus X DPRD Jateng M Yunus bersama Plt Sekda Karanganyar Zulfikar Hadid.

PENGARUH MUDIK LEBARAN DI SUKOHARJO

Pembayaran PBB Capai 22,58 Persen

SUKOHARJO (KR) - Realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 mencapai 22,58 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan 3,68 persen selama momen Lebaran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko, mengatakan sampai saat ini pembayaran PBB tahun 2024 sudah 22,58 persen dari anggaran Rp 36 miliar atau realisasi Rp 8.129.359.810.

Menurutnya, momen Lebaran memberikan kontribusi besar pada kenaikan realisasi pembayaran PBB. Sebab banyak wajib pajak dari luar daerah mudik ke kampung halaman dan segera melunasi kewajibannya bayar PBB. Banyak perantau saat pulang kampung langsung melakukan pembayaran PBB secara online, karena perkantoran masih

libur lebaran.

Disebutkan, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura memiliki potensi besar dalam pemasukan pajak, seiring pertumbuhan usaha dan bertambahnya wajib pajak. Walaupun wajib pajak belum menrima SPT, mereka sudah bisa melakukan pembayaran melalui Payment Point pada Bank Jateng di

kecamatan. Juga bisa melalui kanal-kanal pembayaran seperti Indomart, Alfamart, Tokopedia, Go-pay, Bukalapak, Ovo, Kantor Pos, Blibli, dan Qris Bima Bank Jateng," jelasnya.

Dikatakan, pembayaran PBB setiap tahun di Kabupaten Sukoharjo sudah bisa dilakukan mulai Januari. Bahkan hingga akhir Februari lalu ter-

catat sudah ada lima desa lunas 100 persen pembayaran PBB. BPKPAD Sukoharjo mencatat rekor pelunasan pembayaran kembali dipegang Desa Karagasem Kecamatan Bulu. Kemudian Desa Genengsari Kecamatan Polokarto, Desa Pojok Kecamatan Tawangsari, Desa Kemasan Kecamatan Polokarto, dan Desa Kenoko Kecamatan Polokarto.

BPKPAD Sukoharjo juga mencatat, dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, tiga desa Kecamatan Polokarto sudah lunas pembayaran PBB. Dari Kecamatan Bulu dan Kecamatan

Tawangsari, masing-masing satu desa, sedangkan kecamatan lain belum ada desa yang lunas PBB.

"Percepatan distribusi SPPT PBB 2024 memang dilakukan untuk mempercepat pencapaian pelunasan pembayaran PBB, yang ditargetkan Rp 36 miliar, naik Rp 1 miliar dibanding dari 2023 yakni Rp 35 miliar. Kenaikan target antara lain dilandasi pertimbangan bahwa potensi nilai PBB dan jumlah wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo selama ini terus bertambah. Kami optimis bisa merealisasikan target tersebut," tegas Richard. (Mam)-f

Wajah Lama-Baru Anggota DPRD Magelang

MAGELANG (KR) - KPU Kabupaten Magelang melakukan Rapat Pleno Terbuka Penghitungan dan Penetapan Perolehan Jumlah Kursi serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Magelang Pemilihan Umum Tahun 2024 di daerah Ngrajek Mungkid Magelang, Kamis (2/5) malam lalu. Rapat ini dipimpin Ketua KPU Kabupaten Magelang Ahmad Rofik, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Drs Adi Waryanto maupun lainnya.

Informasi yang diperoleh KR dari KPU Kabupaten Magelang usai pelaksanaan rapat pleno, Kamis tengah malam, menyebutkan dari 50 anggota DPRD Kabupaten Magelang hasil Pemilu 2024, 26 orang diantaranya 'wajah baru' dan 24 orang lainnya 'wajah lama' ada yang sudah 1 periode akan 2 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Magelang, ada juga yang sudah 2 periode ke 3 periode terus menerus dan ada juga yang lebih dari itu.

Ketua DPC PPP Kabupaten Magelang Lilik Tri Handoko kepada KR di sela-sela kegiatan rapat

pleno mengatakan dari hasil penetapan ini ada pertambahan jumlah perolehan kursi DPRD Kabupaten Magelang bagi PPP Kabupaten Magelang. Kalau dari Pemilu 2019 lalu PPP memperoleh 4 kursi atau wakilnya di DPRD Kabupaten Magelang, dari Pemilu 2024 ini menjadi 5 kursi atau wakilnya yang duduk di DPRD Kabupaten Magelang.

Sementara itu KPU Kota Magelang juga melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penghitungan dan Penetapan Perolehan Jumlah Kursi serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Magelang Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dipimpin Ketua KPU Kota Magelang Misbachul Munir di Kantor KPU Kota Magelang diantaranya dihadiri Sekretaris Daerah Kota Magelang Hamzah Kholifi maupun lainnya, Kamis siang.

Jumlah kursi yang ditetapkan di Kota Magelang sejumlah 25 kursi yang dibagi dalam 3 daerah pemilihan (dapil), Dapil Kota Magelang 1 sejumlah 8 kursi, Dapil Kota Magelang 2 sejumlah 10 kursi, Dapil Kota Magelang 3 sejumlah 7 kursi.



KR-Thoha

Ketua KPU Kabupaten Magelang menyerahkan hasil penetapan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang.

Ada beberapa partai politik yang memiliki anggota atau wakilnya yang berhasil duduk menjadi anggota DPRD Kota Magelang dari hasil Pemilu

2024 ini, diantaranya PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, Partai Hanura dan Partai Demokrat. PDI Perjuangan memperoleh 7

kursi, PKB 4 kursi, Partai Gerindra 3 kursi, Partai Golkar 3 kursi, PKS 3 kursi, Partai Hanura 2 kursi, dan Partai Demokrat 3 kursi. (Tha)-f

Mimbar Legislatif

Penanganan Banjir dan Rob Dipertanyakan

KOMISI D DPRD Jawa Tengah mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat mengenai penanganan serta penyelesaian masalah banjir dan rob di Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah terutama menjelang musim penghujan tahun ini. Penanganan masalah banjir dan rob secara keseluruhan berada dalam kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR.

Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Komisi D DPRD Jawa Tengah Chamim Irfani saat melakukan kunjungan kerja ke Ditjen SDA Kementerian PUPR di Jakarta, Senin (29/4). Jajaran Komisi D ditemui oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur dan Bali Rakhman Taufik.

Pada pertemuan itu satu per satu anggota Komisi D menyoroti masalah banjir dan rob yang tidak kunjung selesai, terutama di sepanjang daerah Pantura. Mulai dari Brebes sampai Rembang, banjir dan rob selalu ada bahkan cakupan areal yang tergenang semakin luas.

Komisi D mempertanyakan soal kebijakan strategis apa yang akan dilakukan pemerintah pusat. Termasuk pola pembangunan yang terintegrasi terutama untuk jalur darat. Langkah strategis apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat untuk penanganan di Pantura.

Masalah gaint wall atau tanggul laut sejauh ini perkembangannya seperti apa. Terlebih masalah di Sayung, Demak, juga kasus banjir bandang di Karanganyar, Demak apakah ada rencana normalisasi se-

Chamim Irfani
KR-Budiono

Akibatnya banjir dan rob selalu datang setiap saat. Berkaca pada penanganan banjir dan rob di DKI Jakarta, ada semacam bentuk kerja sama antara pusat dan daerah.

Perlunya kerja sama ini supaya ada kejelasan mengenai siapa menangani apa. Pemprov DKI dan Kementerian PUPR lebih jelas. Di Jawa Tengah pun dalam penanganannya bila bersinggungan dengan pembebasan lahan tidak bisa berbuat banyak. Itu menjadi masalah pemerintah daerah. Di Jateng sampai sekarang belum ada MoU.

Soal penanganan banjir, skemanya adalah pembangunan kolam retensi di sejumlah daerah. Fungsi kolam tersebut merupakan kawasan tangkapan air untuk kemudian dipompa ke sungai atau laut terdekat. Untuk pengendalian banjir, sekarang sudah mulai dilakukan normalisasi. Seperti yang dilakukan di Sungai Serang Wulan yang terbagi menjadi dua subdrainase yakni Serang Wulan Drainase (SWD) I dan SWD II. Sungai Juwana pun sudah dilakukan normalisasi. □-f

(Disampaikan oleh Sekretaris Komisi D DPRD Jateng Chamim Irfani kepada wartawan KR Biro Semarang Budiono Isman-Anf)